

---

*suara rakyat*  
*suara*  
*keistimewaan*

---

Victoria Sundari Handoko  
Fransisca Anita Herawati  
Bambang Kusumo Prihandono  
Lukas S. Ispandriarno

**Cahaya Atma Pustaka**

---

# suara rakyat suara keistimewaan

---

Oleh: Victoria Sundari Handoko  
Fransisca Anita Herawati  
Bambang Kusumo Prihandono  
Lukas S. Ispandriarno

Hak Cipta © 2020, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa-  
pun, tanpa izin tertulis dari penerbit*

|             |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|
| Cetakan ke- | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| Tahun       | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta

Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN: 978-623-6678-06-0

# PRAKATA

Proses kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) tergolong panjang, juga panas. Perbincangan tidak hanya di tingkat lokal Yogyakarta, melainkan juga di tingkat nasional, melibatkan parlemen dan presiden. Isu penting yang menimbulkan tarik-menarik antara Jakarta dan Yogyakarta adalah pengisian jabatan gubernur, melalui pengangkatan atau penetapan.

Setelah UUK DIY disahkan, sejumlah isu penting juga menjadi diskusi hangat di kalangan masyarakat, akademisi, dan media massa. Isu-isu tersebut merupakan kewenangan dan urusan Pemerintah DIY (Pasal 7 ayat 1) yakni tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Di antara sejumlah hal di atas, isu pertanahan merupakan isu terpenting namun juga terpanas karena mengandung konflik, terutama antara Pemerintah Daerah, Keraton, dan masyarakat. Isu kebudayaan tidak begitu hangat diperdebatkan, padahal ini adalah perkara penting dalam konteks politik keistimewaan DIY. Isu kebudayaan mencuat dalam kaitan dengan dana keistimewaan (danais), di mana Pemda telah mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan harus segera mengalokasikannya kepada masyarakat. Pemda kemudian mendorong masyarakat mengajukan proposal pencairan dana

asal kegiatannya berhubungan dengan kebudayaan. Oleh karena dikejar target segera mencairkan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya, maka lahirlah berbagai aktivitas “kebudayaan” seperti penyelenggaraan seni tradisional di berbagai kelompok masyarakat.

Memasuki tahun 2015, keistimewaan DIY kembali memanas setelah Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja. Kendati Sultan menyebut keduanya merupakan urusan internal Keraton Yogyakarta, tak pelak soal ini menimbulkan perbincangan luas di tingkat nasional, dan juga melahirkan konflik di tingkat internal keluarga Keraton.

Buku ini merupakan hasil riset yang dilakukan pada tahun 2007 ketika UUK DIY belum disahkan. Penulis mencoba mengaitkan temuan-temuan penelitian berupa sikap masyarakat atas Keistimewaan DIY dengan perspektif Sosiologi dan Politik, antara lain konsep perubahan sosial. Keistimewaan Yogyakarta adalah persoalan hubungan antara Keraton, pemerintah, dan masyarakat di mana Keraton memiliki peran utama bahkan menjadi ruang konflik kepentingan. Keraton, beserta figur pemimpinya bukan sekadar institusi, namun merupakan kekuatan yang mewakili “ideologi”, “ekonomi” dan “politik”. Lalu, di manakah posisi rakyat? Di manakah suara rakyat?

Buku ini mencoba melukiskan dan menegaskan bahwa pendapat masyarakat atau suara rakyat adalah suara keistimewaan. Logikanya, keistimewaan bukan melulu soal pengisian jabatan, tata ruang, pertanahan maupun kebudayaan. Keistimewaan adalah keseluruhan dari semuanya itu, di mana rakyat menjadi subyek. Bicara dan mengurus (UU) Keistimewaan adalah bicara dan mengurus kebutuhan rakyat yaitu kesejahteraan, kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun demikian, buku ini

menggambarkan bahwa suara rakyat boleh dikatakan terbelah, ambigu. Di satu sisi mendukung keberagaman atau multikulturalisme misalnya, namun di sisi lain bersikap berbeda ketika berhadapan dengan konsep kepemilikan tanah. Ada kelompok masyarakat yang dianggap sebagai "yang lain" atau "liyan".

Ambiguitas menjadi temuan menarik dalam buku ini, karena mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya. Sikap masyarakat atas kepemimpinan Sultan telah melukiskan terjadinya transisi dari masyarakat tradisionalisme homogen ke masyarakat modern yang heterogen. Dalam konteks riil, kondisi transisional inilah yang harus terus-menerus dicermati dan dikawal sehingga menuju kepada keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Keistimewaan DIY. Dengan demikian, amanat UUK untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis sungguh membawa kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian hingga penerbitan buku ini. Kepada para asisten penelitian, sejumlah narasumber, dan juga kepada Panitia Dies Ke-50 Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Semoga kami dapat memperbaiki berbagai kelemahan dalam penelitian dan penulisan buku ini melalui penelitian dan penerbitan buku selanjutnya.

Yogyakarta, Juli 2015.

Tim Penulis Buku Keistimewaan DIY  
FISIP, UAJY



# DAFTAR ISI

|                |  |     |
|----------------|--|-----|
|                | Prakata  | iii |
| <b>BAB I</b>   | PENDAHULUAN  | 1   |
|                | 1. Strategi dalam Arena                                | 6   |
|                | 2. Modal Ekonomi, Politik dan Budaya.                  | 7   |
|                | 3. Tindakan Aktor: Sikap dan Keinginan                 | 8   |
|                | 4. Gerakan sosial: konflik dan perubahan               | 10  |
|                | 5. Metode Penelitian                                   | 10  |
| <b>BAB II</b>  | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA                             | 17  |
|                | 1. Kotamadya Yogyakarta                                | 18  |
|                | 2. Kabupaten Bantul                                    | 24  |
|                | 3. Kabupaten Sleman                                    | 34  |
|                | 4. Kabupaten Kulon Progo                               | 40  |
|                | 5. Kabupaten Gunungkidul                               | 45  |
| <b>BAB III</b> | SIKAP MASYARAKAT ATAS KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA       | 57  |
|                | 1. Sikap terhadap Tanah Sultan dan Paku Alam           | 57  |
|                | 2. Sikap Masyarakat terhadap Aspek-Aspek<br>Kebudayaan | 67  |
|                | 3. Multikulturalisme Orang Jawa                        | 70  |
| <b>BAB IV</b>  | KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA                                | 81  |
|                | Penutup  | 107 |
|                | DAFTAR PUSTAKA   | 111 |





## DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah, M. Roem, M. Lubis, K. Mochtar dan S. Maimoen (ed.), 1982. *Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anderson, Ben. 1992. *Imagined Community*. London: Verso.
- Azra, Asyumardi. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius dan Impuls.
- Bourdieu, Pierre. 1992. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Darmawan, Adhi, 2010. *Jogja Bergolak: Diskursus Keistimewaan DIY dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Elias, Norbert. 2001. *Ueber der Process der Zivilisation I/II*. Frankfurt am Main: Shurkamp.
- Engels, James F. Roger D. Blackwell dan Paul W. Miniard. 1992. *Perilaku Konsumen (terj.) 6<sup>th</sup> Edition*. Jilid 1. Jakarta Binarupa Aksara.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Glencoe: The free Press.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nation and Nationalism*. Itaka: Cornell University Press.
- Giddens, Anthony. *The Constution of Society*. London: Polity Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Masa Kolonialisme sampai dengan Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kotler, Philip. 1992. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian (terj.) Jilid 2. Edisi 1*. Jakarta: Erlangga.
- Littlejohn, Stephen J. 1992. *Theories of Human Communication, 4<sup>th</sup>. Ed.* Belmont: Wadsworth Publishing Company.

- Luthfi, Ahmad Nashih, dkk., 2014. *Keistimewaan Yogyakarta: yang Diingat dan yang Dilupakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Luxemburg, Rosa. 1975. *Gesammelte Werke S: Oekonomische Schriften, Die Akkumulation des Kapitals*. Berlin: Dietz Verlag.
- Moertono, Sumarsaid. 1985. *State and Statecraft in Old Java: A Study of The Letter Mataram Period 16<sup>th</sup> – 19<sup>th</sup>*. Itaka: Indonesian Modern Project.
- M. Nazir, (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roem, Mohammad, dkk., 1982. *Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rozaki, dkk. (eds.). 2003. *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sasminto, Henricus Tugiman. 1998. *Pemimpin Agung Binatara*. Jakarta: Yayasan Gita Buana.
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Smith, Anthony D. 1998. *Nationalism and Modernism*. London. Routledge.
- Sujanto. 1988. *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Susanto, Budi A. 1993. *Peristiwa Yogya 1992: Siasat Politik Massa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Suyitno. 2007. “Tanah SG dalam Kajian Hukum Pertanahan Nasional”. *Makalah untuk BPPD Kabupaten Sleman*. 3 April 2007.
- Weber, Max. 1978. *Economic and Society*. Berkeley: University California Press.

## BUKAN BUKU

- Antara. 22 Februari 2008.  
<http://www.bps.go.id/profile/diy.shtml>. diakses 2 Mei 2007.  
 (<http://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html>  
<http://www.bantulkab.go.id/>  
<http://www.jogja.go.id/>  
<http://www.kulonprogo.com/>

- <http://www.random.org/>  
<http://slemankab.go.id/wp-content/file/rpjm/bab4.pdf>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta)  
 BPS Propinsi DIY. 1999. Penerbit BPS Propinsi DIY.  
 BPS Propinsi DIY. 2002. Penerbit BPS Propinsi DIY  
 Buku Statistik Tahunan Daerah Sleman, 2000-2003. Penerbit BPS Kabupaten Sleman.  
 Institute for Research and Enviroment (tim), 2003. *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta. IRE Press.  
 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sleman. 2006. *Kedaulatan Rakyat*, 17 April 2007.  
*Kedaulatan Rakyat*. 20 Februari 2008.  
*Kedaulatan Rakyat*, 14 Maret 2008.  
*Kedaulatan Rakyat*, 28 Maret 2008.  
*Kompas*, 13 April 2007.  
 Mranani, Alit. Himpunan Masalah Agraria Struktural di DIY. <http://program.ivaa-online.org/himpunan-masalah-agraria-struktural-di-diy-terkini/>. 12 April 2015.  
 Monografi Desa Sumberarum. 2006.  
 Santoso, Aboeprijadi, *Onghokham: Sejarahwan Imajinatif*. Indoprogress. blogspot, 2007/09.  
 Sindo, 20 Maret 2008.  
*Suara Merdeka*, 2 Juni 2007.  
 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954  
 UU nomor 3 tahun 1950. Kewenangan Otonomi Propinsi DIY.  
 Wahyono, Bayu. 2001. *Resonansi Kekuasaan Kraton Yogyakarta pada Era Demokrasi*. Yogyakarta. Inpendam. (Hasil Penelitian tidak dipublikasikan).